



# PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

---

**ZONA INTEGRITAS / WBK  
III.2.B**

**BIRO UMUM  
KEPANITERAAN DAN  
SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

## DAFTAR ISI

1. SK Pemindahan PNS MK
2. Penunjukan Sdr. Ardli Sebagai Kabag Pengamanan
3. Perpanjangan Elisabeth sebagai Plt. Karo Umum
4. Foto Perubahan SIKD



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 229 TAHUN 2019

TENTANG

### PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

#### SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi perlu memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini pada jabatan baru sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2017



tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi;

Memperhatikan : Surat Tugas Kepala Biro Sumber Daya Manusi dan Organisasi Nomor.23/2200/03/2019, Nomor.24/2200/03/2019, Nomor. 25/2200/03/2019, Nomor.26/2200/03/2019, Nomor.27/2200/03/2019, tanggal 1 Maret 2019, dan Nomor. 62/2200/04/2019 tanggal 23 April 2019, dan hasil kesepakatan Rapat Pimpinan tanggal 27 September 2019, serta Rapat Pimpinan tanggal 2 Oktober 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang namanya sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua), diangkat ke dalam jabatan baru sebagaimana tercantum pada lajur 6 (enam), terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum pada lajur 8 (delapan), pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2019 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 226 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Oktober 2019  
SEKRETARIS JENDERAL,  
**M. GUNTUR HAMZAH**



Lampiran I Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
NOMOR 229 TAHUN 2019  
Tanggal 02 Oktober 2019

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		UNIT KERJA	TMT
				LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Andi Aprilla Megananda Sanusi, S.E.	19770424 200604 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Penata Usaha Aplikasi Sistem Informasi Keuangan	Verifikator	Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Maret 2019
2	Ruccy Susanto, S.Sos.	19741023 200604 1 001	Penata (III/c)	Penata Usaha Surat Perintah Membayar	Verifikator	Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Maret 2019
3	Allita Prisantama, S.Ak.	19950129 201801 2 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Aplikasi Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	Penata Usaha Akuntansi dan Penyusun Laporan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Maret 2019
4	Aris Wahyu Hajianto, S.E.	19930706 201801 1 002	Penata Muda (III/a)	Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	Analisis Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Maret 2019
5	Medi Kurniadi, S.Kom.	19760701 200604 1 005	Penata Tk. I (III/d)	Pengelola Kesejahteraan Hakim dan Pegawai	Pengadministrasi Umum	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	23 April 2019
6	Sylvia Yuliani, S.E.	19790710 200912 2 002	Penata (III/c)	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Analisis Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Oktober 2019
7	Debby Yelviona, S.E., M.B.A.	19850513 200912 2 003	Penata (III/c)	Analisis Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	1 Oktober 2019
8	Muhlis Nova	19691117 199103 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengelola BMN dan Fasilitas Persidangan	Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	1 Oktober 2019
9	Muhamad Nurtamymy, S.Sos., M.Si.	19850321 200712 1 001	Penata (III/c)	Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan	Pengelola BMN dan Fasilitas Persidangan	Biro Umum	1 Oktober 2019



10	Amriansyah Maulana, S.H.	19901023 201501 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Sekretaris Sekretaris Jenderal	Penghubung Antar Lembaga dan Masyarakat	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	1 Oktober 2019
11	Syamsudin Noer, S.H., M.H.	19771221 200912 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1 Oktober 2019
12	Nuzul Qur'aini Mardiyah, S.H., M.H.	19830629 201012 2 001	Penata (III/c)	Pengolah Data Perkara dan Putusan	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1 Oktober 2019
13	Supriyanto, S.H.	19810718 200604 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Juru Panggil	Pengadministrasi Pelayanan Persidangan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1 Oktober 2019
14	Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	19870524 201012 1 002	Penata (III/c)	Pengolah Data Perkara dan Putusan	Pengadministrasi Pelayanan Persidangan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1 Oktober 2019
15	Aqmarina Rasika, S.H.	19901210 201402 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Pengadministrasi Pelayanan Persidangan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1 Oktober 2019
16	Khairuddin, S.H.	19680518 201212 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Juru Panggil	Pengolah Data Perkara dan Putusan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1 Oktober 2019
17	Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	19860902 200901 2 001	Penata (III/c)	Pengadministrasi Pelayanan Persidangan	Pengolah Data Perkara dan Putusan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1 Oktober 2019
18	Indah Karmadaniah, S.H., M.H.	19900619 201402 2 002	Penata (III/c)	Pengadministrasi Pelayanan Persidangan	Pengolah Data Perkara dan Putusan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1 Oktober 2019
19	Rio Tri Juli Putranto, S.H., M.H.	19750726 200604 1 002	Penata (III/c)	Pengadministrasi Pelayanan Persidangan	Juru Panggil	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1 Oktober 2019



20	Fenny Tri Purnamasari, S.H., M.H.	19901003 201402 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penghubung Antar Lembaga dan Masyarakat	Juru Panggil	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1 Oktober 2019
21	Widy Hastowahyudi, S.Kom.	19830831 200712 1 001	Penata (III/c)	Pranata Komputer Muda pada Pusdik Pancasila dan Konstitusi	Pranata Komputer Muda pada Pusat TIK	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Oktober 2019
22	Nanda Adytiansyah, S.Kom.	19851229 200901 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Pranata Komputer Muda pada Pusat TIK	Pranata Komputer Muda pada Pusdik Pancasila dan Konstitusi	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Oktober 2019
23	Muhammad Radhi Zhafari, A.Md.	19910312 201801 1 001	Pengatur (II/c)	Pengelola Instalasi TI	Pengelola Instalasi TI di Sekretaris Jenderal	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Oktober 2019

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Oktober 2019  
SEKRETARIS JENDERAL,  
**M. GUNTUR HAMZAH**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 123.1 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN

**SDR. ARDLI NURYADI, S.SOS., M.SI., NIP 19801016 200604 1 004**  
**SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TUGAS KEPALA BAGIAN PENGAMANAN**  
**DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI**

### SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Nomor: 348/KP.05.03/04/2020, tertanggal 30 April 2020 perihal Pengembalian dan Penghadapan Sdr. AKBP. Murry Miranda. S.I.K., NRP. 74020660, Kepala Bagian Pengamanan di Mahkamah Konstitusi RI ke kesatuan asal di lingkungan POLRI, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, perlu mengangkat Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Pengamanan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa Sdr. Ardli Nuryadi, S.Sos., M.Si., NIP 19801016 200604 1 004, Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a, Jabatan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dipandang cakap untuk disertai tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Pengamanan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Penunjukan Sdr. Ardli Nuryadi, S.Sos., M.Si., NIP 19801016 200604 1 004 sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Pengamanan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat





Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENUNJUKAN SDR. ARDLI NURYADI, S.SOS., M.SI., NIP 19801016 200604 1 004 SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TUGAS KEPALA BAGIAN PENGAMANAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.**

Kesatu : Menetapkan Sdr. Ardli Nuryadi, S.Sos., M.Si., NIP 19801016 200604 1 004, Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a, disertai tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Pengamanan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi selain melaksanakan tugas definitif sebagai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan telah diangkat pejabat definitif Kepala Bagian Pengamanan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I;
5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Pegawai yang bersangkutan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 01 Mei 2020  
SEKRETARIS JENDERAL,  
**M. GUNTUR HAMZAH**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 124 TAHUN 2020

### TENTANG PERPANJANGAN PENUGASAN SAUDARI ELISABETH, S.E. SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TUGAS KEPALA BIRO UMUM DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

#### SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

- Menimbang : a. bahwa Saudari Elisabeth, S.E. NIP 196409061986032004 Pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b, Jabatan Kepala Bagian Rumah Tangga, Arsip dan Ekspedisi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 44 Tahun 2020 terhitung mulai tanggal 03 Februari 2020 telah ditetapkan menjadi Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, perlu memperpanjang penugasan Saudari Elisabeth, S.E. NIP 196409061986032004 sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Perpanjangan Penugasan Saudari Elisabeth, S.E. sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERPANJANGAN PENUGASAN SAUDARI ELISABETH, S.E. SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TUGAS KEPALA BIRO UMUM DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**

Pertama : Menetapkan Perpanjangan Penugasan Saudari Elisabeth, S.E. NIP 196409061986032004 Pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b, selain melaksanakan tugas definitif sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga, Arsip dan Ekspedisi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan telah diangkat pejabat definitif Kepala Biro Umum di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

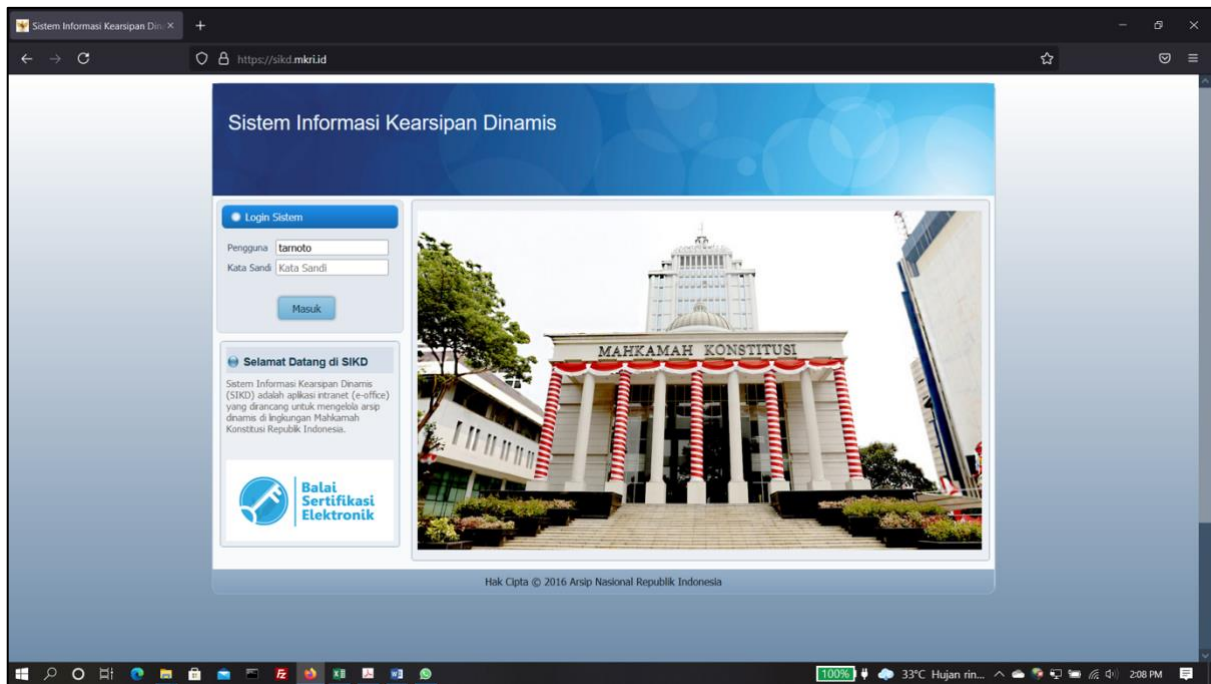
**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
6. Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I;
8. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
9. Pegawai yang bersangkutan

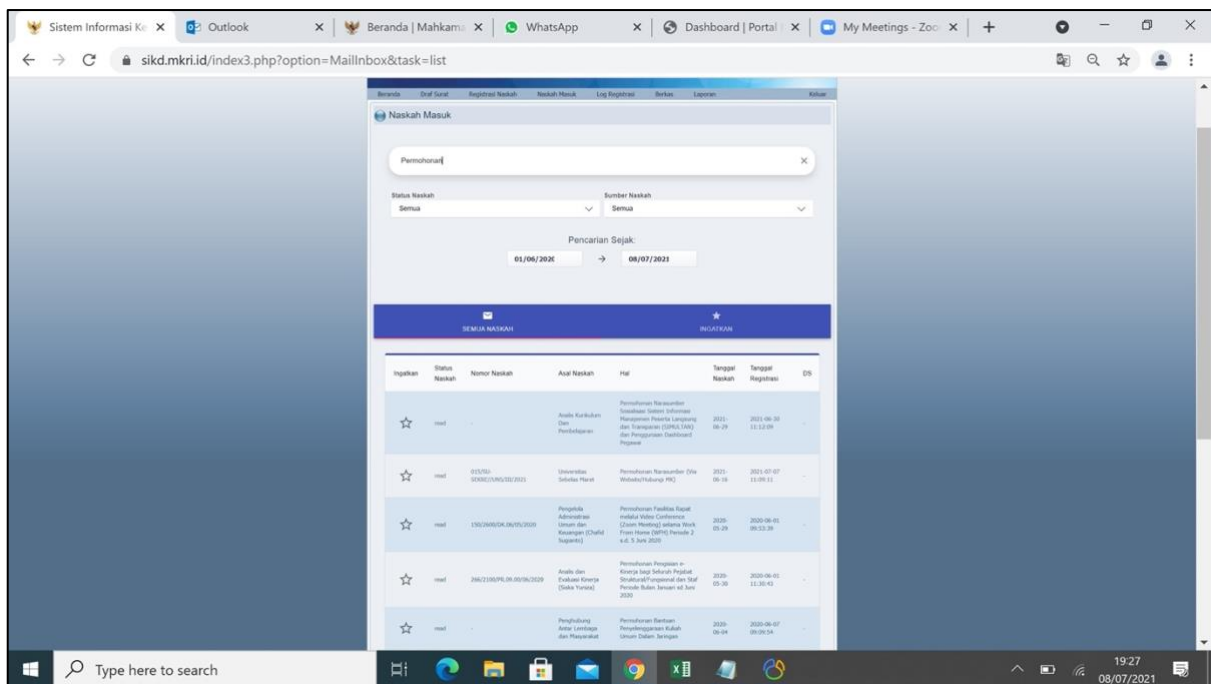
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 Mei 2020  
SEKRETARIS JENDERAL,  
**M. GUNTUR HAMZAH**



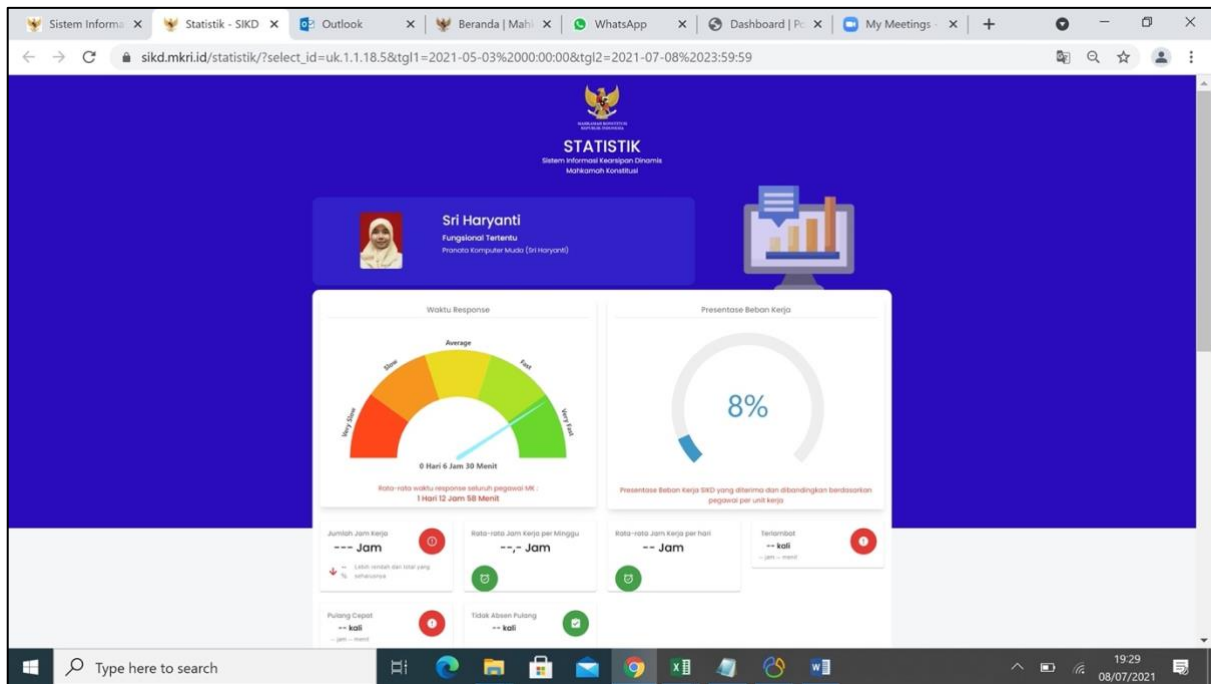
## 1. Login SIKD



## 2. Naskah Masuk



### 3. Statistik



### 4. Laporan Waktu Respon

The report shows the following data for the period 08/04/2021 to 08/07/2021:

No.	rata-rata	Nama	Jml. Berat	Link
1	26 Hari 2 Jam 47 Menit	Jamaludin Salim	4	<a href="#">detail</a>
2	8 Hari 0 Jam 3 Menit	Anis Yurtha	43	<a href="#">detail</a>
3	7 Hari 11 Jam 5 Menit	Nahar Samet	45	<a href="#">detail</a>
4	5 Hari 13 Jam 42 Menit	Adam Ghuzale Ramadhan, S.Kom.	59	<a href="#">detail</a>
5	4 Hari 18 Jam 12 Menit	Muhamad Azzis, S.Kom.	62	<a href="#">detail</a>
6	4 Hari 18 Jam 12 Menit	Muhammad Ridho Ihsan, S.Si.	66	<a href="#">detail</a>
7	4 Hari 2 Jam 21 Menit	Agung Wiro Laksono, A.Mi.	43	<a href="#">detail</a>
8	3 Hari 23 Jam 15 Menit	Rachman Karim	50	<a href="#">detail</a>
9	3 Hari 20 Jam 1 Menit	Widy Hastawahyudi	62	<a href="#">detail</a>
10	3 Hari 1 Jam 51 Menit	Nur Rakhman	46	<a href="#">detail</a>
11	2 Hari 18 Jam 50 Menit	Rudi Kusnawan	30	<a href="#">detail</a>
12	1 Hari 21 Jam 30 Menit	Tamoto	58	<a href="#">detail</a>
13	1 Hari 19 Jam 2 Menit	Taufik Gunanda	83	<a href="#">detail</a>
14	1 Hari 18 Jam 24 Menit	Jakin Indriani Br Purba, S.Kom.	62	<a href="#">detail</a>
15	1 Hari 9 Jam 44 Menit	Muhammad Radhi Zhaferi, A.Mi.	20	<a href="#">detail</a>
16	1 Hari 7 Jam 30 Menit	Ishak Purnama	67	<a href="#">detail</a>

## 5. Fitur Agenda Rapat

The screenshot shows the 'Sistem Informasi Kearsipan Dinamis' interface. The main content area displays 'Riwayat Surat Dibaca Selama 7 Hari' with a table of read letters. The table has columns for No., Tgl.Dibaca, Pengirim, Perihal, Jenis Surat, and Kecepatan Respon. Below the table is a 'Petunjuk Umum' section with instructions for various system features.

No.	Tgl.Dibaca	Pengirim	Perihal	Jenis Surat	Kecepatan Respon
1	2021-07-16 09:35:23	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sosialisasi Sistem Manajemen Kinerja PNS dan dan Sistem Informasi Kinerja PNS	Disposisi	0 Hari 13 Jam 48 Menit
2	2021-07-15 12:55:26	Pranata Komputer Muda (Sri Haryanti)	Monitoring dan Evaluasi Dokumen ZI dengan LXE di 6 area Pusat TIK	Teruskan	0 Hari 14 Jam 54 Menit
3	2021-07-13 05:29:43	Sekretariat Jenderal	Nodin Hasil Rapat Teknis Tindak Lanjut Rakor Pelayanan Persidangan Mahkamah Konstitusi	Tembusan	0 Hari 18 Jam 6 Menit
4	2021-07-11 23:16:18	Analisis Organisasi dan Tata Laksana (Debby Yelviona)	Undangan Sosialisasi terkait Sistem Merit dan Manajemen Talenta tgl 12 Juli 2021	Nota Dinas	1 Hari 9 Jam 18 Menit
5	2021-07-11 23:16:18	Analisis Organisasi dan Tata Laksana (Debby Yelviona)	Undangan Sosialisasi terkait Sistem Merit dan Manajemen Talenta tgl 12 Juli 2021	Nota Dinas	1 Hari 8 Jam 50 Menit

**Petunjuk Umum:**

- Menu Registrasi Surat untuk melakukan Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar
- Menu Surat Masuk untuk melihat Surat Masuk
- Menu Log Surat Keluar untuk melihat Surat Keluar pernah Anda buat sebelumnya
- Menu Berkas untuk melihat Berkas Unit Kerja (sebagai Administrator Unit) serta Notifikasi Berkas Aktif
- Klik tab Pengaturan Unit Kerja & Pengguna untuk melihat Unit Kerja dan Pengguna Aplikasi
- Klik tab Pengaturan Umum untuk melihat Komponen Pengaturan Umum Aplikasi
- Klik tab Pengaturan Klasifikasi & Berkas untuk melihat dan mengatur Klasifikasi dan Berkas
- Klik tab Laporan untuk memilih dan menampilkan Laporan

The screenshot shows the 'Agenda Rapat - MKRI' calendar for July 2021. The calendar is a grid with days of the week (Min, Sen, Sel, Rab, Kam, Jum, Sab) and dates. A meeting is scheduled for July 17th, 2021, with the title '11 RPH Non Perdana (ter) @ 13 Rapat Monev ZI deng'.

Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7